



**TAHUN  
2024**

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN JUAI**

## **KATA PENGANTAR**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Juai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Juai dan telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Juai tahun 2024 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Juai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT JUAI**  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Juai Tahun 2024 ini disusun untuk menyajikan laporan capaian indikator kinerja dan evaluasi atas tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Juai selama tahun 2024. Adapun penganggaran kegiatan tersusun dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Juai tahun 2024 setelah dilakukan penyusunan kembali pohon kinerja dan cascading adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik, dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM). Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2024 adalah sebesar 87,67 dengan rasio capaian sebesar 100,02%.

Sedangkan untuk capaian sasaran strategis tahun 2024 yang merupakan perjanjian kinerja camat selaku kepala SKPD dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM) seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial, realisasinya adalah 87,67 atau persentase capaian tahun ini 100,02%.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif, realisasinya adalah 70 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau persentase capaian tahun ini 100%.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, realisasinya adalah sebesar 100%.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan dan realisasi sebesar 100%.

5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi keuangan, realisasinya adalah sebesar 100%.

Alokasi anggaran Kecamatan Juai tahun 2024 berjumlah Rp. 7.996.663.078,00 yang dengan rincian anggaran belanja operasi sebesar Rp. 7.022.668.878,00 dan belanja modal sebesar Rp. 973.994.200,00. 7.490.354.404,00 atau sekitar 93,67% dan terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 6.580.929.405,00 atau 93,71% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.939.443.064,00 atau sekitar 89,90% dan belanja barang sebesar Rp. 3.641.486.341,00 atau sekitar 97,03 % serta belanja modal sebesar Rp. 909.424.999,00 atau sekitar 93,37%.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Juai Tahun 2024 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Juai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

Juai, Februari 2025

**CAMAT JUAI**



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. TUJUAN.....	2
1.4. GAMBARAN UMUM SKPD.....	3
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	8
2.2 RENCANA KERJA (RENJA).....	10
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	16
2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	39
3.3 ANALISIS KINERJA LAINNYA.....	45
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD.....	49
4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	49
4.3. UPAYA PERBAIKAN.....	51

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan .....	5
Tabel 1. 2 Daftar nominatif PNS Kecamatan Juai .....	6
Tabel 2. 1 Data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran renstra 2021-2016 .....	9
Tabel 2. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun Anggaran 2024 .....	10
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai Tahun 2024 .....	16
Tabel 2. 4 Data Perjanjian Kinerja bagi Camat Tahun Anggaran 2024 .....	20
Tabel 3. 1 Analisis Capaian Sasaran Kinerja Pertama Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Pertama Perjanjian Kinerja Camat 2024.....	25
Tabel 3. 3 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Pertama Perjanjian Kinerja Camat 2024.....	26
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Kinerja Kedua Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024.....	28
Tabel 3. 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024.....	29
Tabel 3. 6 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024 .....	30
Tabel 3. 7 Capaian Sasaran Kinerja Ketiga Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024.....	32
Tabel 3. 8 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024 .....	33
Tabel 3. 9 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Ketiga Perjanjian Kinerja Camat Juai 2024.....	34
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Kinerja Keempat Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024.....	36
Tabel 3. 11 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Keempat Perjanjian Kinerja Camat 2024.....	37

Tabel 3. 12 Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 .....	40
Tabel 3. 13 Daftar Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Juai Tahun 2024 .....	44
Tabel 3. 14 Daftar Penghargaan yang Diterima Kecamatan Juai Tahun 2024 .....	45
Tabel 4. 1 Daftar Rincian Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan .....	3
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2024.....	5



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kecamatan Juai berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Juai cukup berat maka dipandang perlu disusun dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Juai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai. Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai pedoman Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024 kemudian dilaporkan pelaksanaannya dengan cara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap akhir tahun dengan batas waktu akhir tertanggal akhir bulan february tahun berikutnya atau pada tanggal 28 Februari 2025. Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Juai untuk pencapaian dalam tahun 2024. Evaluasi atas LKIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan Kecamatan Juai dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Kecamatan Juai harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Juai yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan pelayanan kecamatan dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait layanan kecamatan dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Juai secara nyata dalam upaya pemberian pelayanan kepada

masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

## **1.3. TUJUAN**

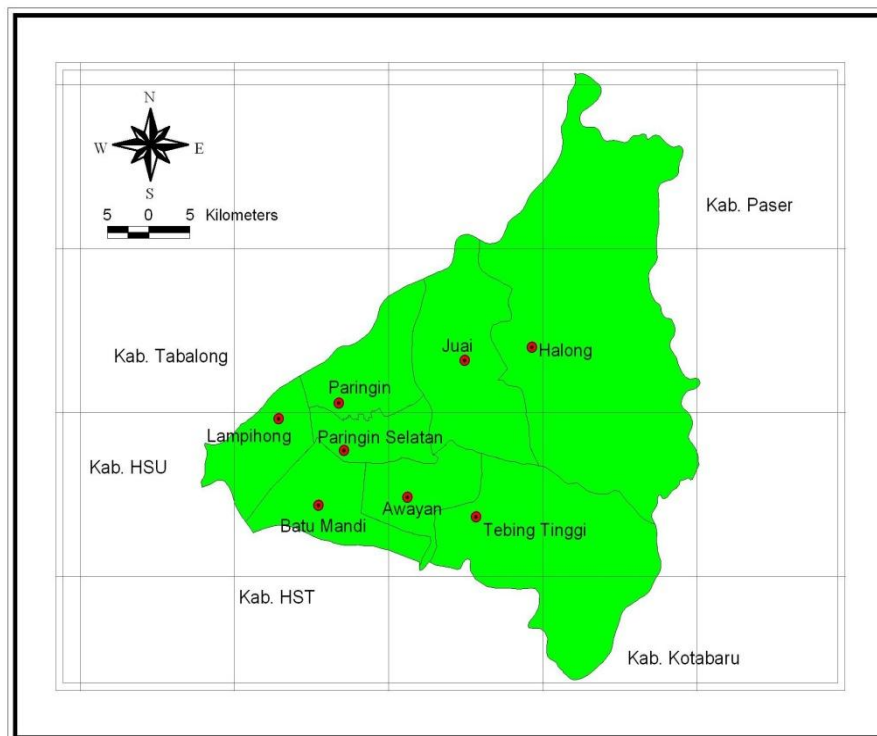
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2024. Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Juai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Kecamatan Juai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

#### 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Kecamatan Juai secara keseluruhan memiliki luas + 386,88 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 21 Desa dan memiliki jumlah penduduk Laki-laki 7.941 Perempuan 7.401 jumlah 15.342 Jiwa. Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong sebelah Utara, Kecamatan Halong sebelah Timur, Kecamatan Aawayan sebelah Selatan dan Kecamatan Paringin sebelah Barat.



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan, Kecamatan yang dipimpin Camat Juai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kecamatan Juai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi Kecamatan di Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
4. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :

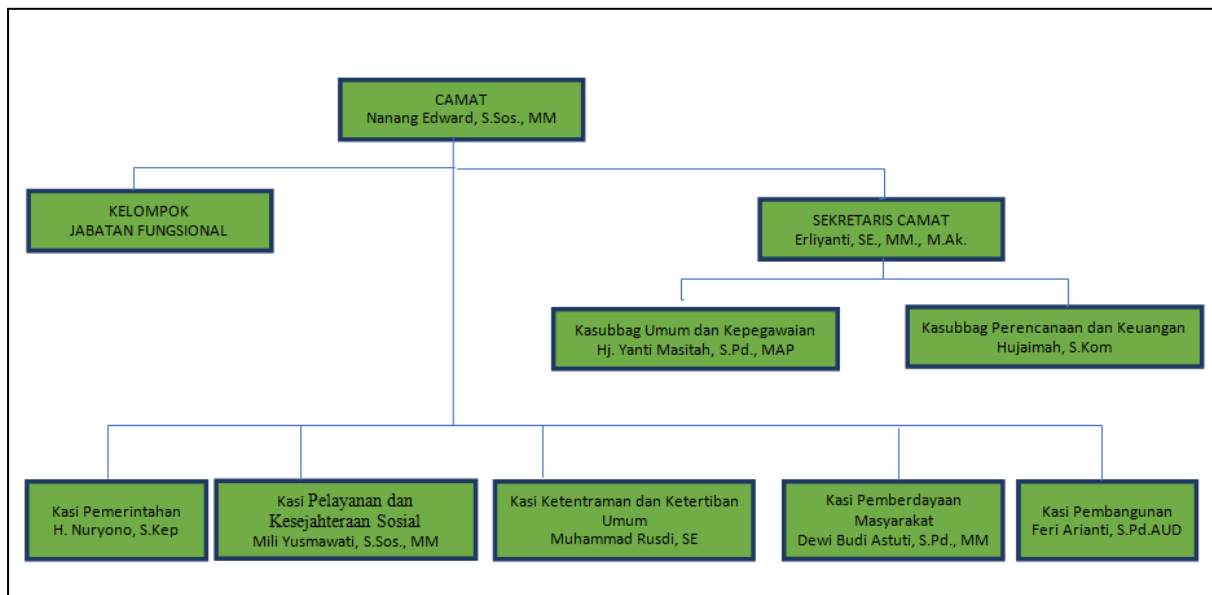
1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
2. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
3. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial;
5. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
6. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembangunan;
7. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
8. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman ketertiban umum, pelayanan dan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
9. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban kecamatan di Kabupaten Balangan, Camat sebagai kepala/pimpinan SKPD di kecamatan memiliki stakeholder sebagaimana susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Pembangunan;
8. Kelurahan
9. Kelompok jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Juai Kabupaten Balangan per 31 Desember 2024 nampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2024

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pejabat struktural dan fungsional dari Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOLONGAN	JLH (ORG)
KANTOR CAMAT JUI	18	SD	-	I/a	-	I	-
		SLTP	3	I/b	-	II	4
		SLTA	2	I/c	-	III	11

D1	-	I/d	-	IV	2
D2	-	II/a	2	VII (PPPK)	1
D3	1	II/b	-		
D4	-	II/c	1		
S1	7	II/d	1		
S2	5	III/a	2		
S3	-	III/b	1		
		III/c	4		
		III/d	4		
		IV/a	1		
		IV/b	1		
		IV/c	-		
		IV/d	-		
		IV/e	-		
		PPPK	1		

Sedangkan nama Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Juai Kabupaten Balangan baik pejabat struktural maupun fungsional umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Daftar Nominatif PNS Kecamatan Juai per 31 Desember 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
01	Nanang Edward,S.Sos.,M.M 19800127 200604 1 016	Pembina (IV/a)	Camat
02	Erliyanti, SE., MM., M. Ak. 19851020 201001 2 031	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Camat
03	Hj. Yanti Masitah,S.Sos.,M.AP 19670319 198703 2 009	Pembina (IV/a)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
04	Mili Yusmawati, S.Sos., MM 19801117 200604 2 024	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial
05	H. Nuryono, S.Kep 19730507 199602 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemerintahan
06	Dewi Budi Astuti,S.Pd 19820305 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
07	Muhammad Rusdi, SE 19770304 200501 1 010	Penata (III/c)	Ketentraman dan Ketertiban Umum

08	Feri Arianti, S.Pd.AUD 19840215 200701 2 002	Penata (III/c)	Kasi Pembangunan
09	Hujaimah,A.Md 19880212 201001 2 016	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10	Muhammad Aditya Pratama, SE 19910214 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pembangunan
11	Yusnani 19770501 200701 1 016	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pemerintahan
12	Akhmad Basuki 19780719 200701 1 007	Penata Muda III/a	Staf Pembangunan
13	Hatmi Susanti 19821215 200801 2 014	Penata Muda III/a	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14	Saihani 1977052 200906 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan
15	Ali Sadikin 19680816 198804 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16	Misnu Raga 19690718 200701 1 029	Pengatur Muda (II/a)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17	Ruslan 19690330 2021212 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18.	Misnawati, A.Md. 19900329 202421 2 002	PPPK Golongan VII	JF Pranata Komputer Terampil

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika LKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2024
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Juai mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik di lingkungan wilayah Kecamatan Juai.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Juai sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Penyesuaian tahun 2021-2026 adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun nilai IKM tersebut didapatkan dari penilaian atas semua pelayanan publik yang dilakukan oleh semua seksi di Kecamatan Juai.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran dari tujuan SKPD Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dengan indikator kinerja jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, dengan indikator kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan serta persentase desa yang tertib administrasi keuangan.

Adapun data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran Kecamatan Juai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2. 1 Data Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Juai Periode Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75
		Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	-	60	70	80	90
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
			persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%

## 2.2 RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja tahun 2024 Kecamatan Juai terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/KabupatenKota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Baik (67,50)	6.025.173.178
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	306.851.700
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.515.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.469.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	293.866.700

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 bulan	3.376.670.578
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang Per Bulan	3.269.845.678
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	106.824.900
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	19.040.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	19.040.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	735.990.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.461.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.844.300
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	587.684.400

	Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	635.248.700
	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	139.267.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.094.200
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	346.887.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	951.372.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	715.039.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	236.333.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Laporan	434.214.700
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan	100%	219.579.800

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	219.579.800
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	214.634.900
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	214.634.900
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Laporan	372.156.100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	231.486.900
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.507.400
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	79.870.000
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	1 Laporan	102.109.500

	masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	140.669.200
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	140.669.200
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	295.471.700
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi	100%	295.471.700
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	295.471.700
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	426.643.600

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	426.643.600
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	126 Orang	121.116.000
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	305.527.600
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Laporan	443.003.800
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Pembangunannya	21 Desa	443.003.800
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	137.971.300
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	137.773.300

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30.449.200
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	41.017.800
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	95.792.200

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai pada perencanaan kinerja (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai Tahun 2024

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik

Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Makna Indikator :</i> Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan Publik kepada seluruh warga masyarakat	Camat Juai	Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan



		(IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	<p>Kecamatan Juai</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam memberikan layanan kepada masyarakat</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>		Sosial
2	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	<p><b>Makna Indikator :</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai sarana bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan</p>	Camat Juai	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

		yang Ditangani	<p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Menjaga Kondusifitas Wilayah</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Memberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100%</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Pemerintahan
		Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam Memberikan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Laporan Realisasi Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi Jumlah Desa Dikali 100%</p>	Camat Juai	Seksi Pembangunan

			<b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri, Berdasarkan Amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa		
--	--	--	---	--	--

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2024 maka Perjanjian Kinerja (PK) kepala SKPD tahun 2024 menurut perencanaan kinerja dapat dilihat sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Data Perjanjian Kinerja bagi Camat Tahun Anggaran 2024

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87,65
02	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	70 LKD
03	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%
04	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumber daya ada beberapa hal yang diukur yaitu:

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja organisasi dapat dilihat pada pencapaian atas target tujuan dan sasaran SKPD. Sebagaimana yang telah disebutkan pada sub bab 2.1 bahwa tujuan SKPD Kecamatan Juai adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan dari penilaian melalui survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik semua seksi di Kecamatan Juai. Untuk mencapai tujuan SKPD tersebut disusun 4 (empat) sasaran SKPD dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sebagai target sasaran kinerja utama Camat Juai selaku Kepala SKPD di Kecamatan Juai.

Data capaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Juai tahun 2024 berdasarkan perencanaan kinerja (Renstra Penyesuaian 2021-2026) sebagaimana termuat dalam dokumen perjanjian kinerja Camat Juai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Analisis Capaian Tujuan Kecamatan Juai Tahun 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
				Target	Realisasi	Capaian						
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,59	87,62	87,65	87,67	100,02%	87,75	99,91	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	93,67%

Adapun penjelasan dari capaian tujuan SKPD Kecamatan Juai di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian tahun 2022 adalah sebesar 87,59 yang didapat dari formula perhitungan nilai IKM semester 1 tahun 2022 sebesar 87,56 ditambah nilai IKM semester 2 tahun 2022 sebesar 87,62 lalu dibagi 2 (dua) sehingga mendapat rata-rata untuk IKM tahun 2022 sebesar 87,59. Adapun target tahun 2022 adalah sebesar 87,55 sehingga rasio capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100,05%.Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 didapat dari jumlah IKM semester I sebesar 87,51 dan Semester II sebesar 87,73 dibagi 2 (dua) sehingga didapat nilai IKM tahun 2023 sebesar 87,62. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 87,60 maka rasio capaian kinerjanya sebesar 100,02%.
2. Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 didapat dari jumlah IKM semester I sebesar 87,56 dan Semester II sebesar 87,78 dibagi 2 (dua) sehingga didapat nilai IKM tahun 2024 sebesar 87,67. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 87,65 maka rasio capaian kinerjanya sebesar 100,02% atau dengan kata lain kategori capaian kinerja sasaran pertama Camat Juai tahun 2024 dinyatakan **sangat berhasil**.

3. Jika rasio capaian tahun 2022 dibandingkan dengan rasio capaian tahun 2023 dan 2024 maka terjadi penurunan rasio capaian IKM di tahun 2023 dan 2024 daripada tahun 2022. Namun dari perhitungan tersebut di atas dapat dilihat rasio capaian tahun 2023 sama dengan rasio capaian tahun 2024.
4. Target akhir tahun renstra adalah sebesar 87,75 sehingga jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2024 sebesar 87,67 maka akan didapatkan nilai rasio capaian terhadap akhir renstra sebesar 99,91% dengan formulasi perhitungan nilai IKM tahun 2024 dibagi nilai target IKM akhir tahun renstra lalu hasilnya dikalikan 100%.
5. Perbandingan capaian sasaran kinerja pertama tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD sejenis di Kabupaten/Kota lain dikarenakan tidak dapat menemukan perbandingan indikator tersebut di SKPD Kecamatan di Kabupaten/Kota lain yang letaknya 1 (satu) provinsi dengan Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan perbandingan capaian RPJMD Provinsi dan Nasional.
6. Serapan anggaran tahun 2024 sebesar 99,55% didapatkan dari realisasi anggaran sebesar Rp. 7.490.354.404,- dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.996.663.078,- atau sebesar 93,67%.

Tabel 3. 2 Analisis Capaian Sasaran Kinerja Pertama Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
				Target	Realisasi	Capaian						
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87,59	87,62	87,65	87,67	100,02%	87,75	99,91	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	99,55%

Adapun penjelasan dari capaian sasaran kinerja pertama kepala SKPD (camat) di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian tahun 2022 adalah sebesar 87,59 yang didapat dari formula perhitungan nilai IKM semester 1 tahun 2022 sebesar 87,56 ditambah nilai IKM semester 2 tahun 2022 sebesar 87,62 lalu dibagi 2 (dua) sehingga mendapat rata-rata untuk IKM tahun 2022 sebesar 87,59. Adapun target tahun 2022 adalah sebesar 87,55 sehingga rasio capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 100,05%.Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 didapat dari jumlah IKM semester I sebesar 87,51 dan Semester II sebesar 87,73 dibagi 2 (dua) sehingga didapat nilai IKM tahun 2023 sebesar 87,62. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 87,60 maka rasio capaian kinerjanya sebesar 100,02%.
2. Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 didapat dari jumlah IKM semester I sebesar 87,56 dan Semester II sebesar 87,78 dibagi 2 (dua) sehingga didapat nilai IKM tahun 2024 sebesar 87,67. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 87,65 maka rasio capaian kinerjanya sebesar **100,02%**. Dengan tercapainya target IKM tahun 2024 dengan rasio capaian di atas 100% maka capaian kinerja tahun 2024 dikategorikan **sangat berhasil**.
3. Jika rasio capaian tahun 2022 dibandingkan dengan rasio capaian tahun 2023 dan 2024 maka terjadi penurunan rasio capaian IKM di tahun 2023 dan 2024 daripada tahun 2022. Namun dari perhitungan tersebut di atas dapat dilihat rasio capaian tahun 2023 sama dengan rasio capaian tahun 2024.
4. Target akhir tahun renstra adalah sebesar 87,75 sehingga jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2024 sebesar 87,67 maka akan didapatkan nilai rasio capaian terhadap akhir renstra sebesar 99,91% dengan formulasi perhitungan nilai IKM tahun 2024 dibagi nilai target IKM akhir tahun renstra lalu hasilnya dikalikan 100%.
5. Perbandingan capaian sasaran kinerja pertama tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD sejenis di Kabupaten/Kota lain dikarenakan tidak dapat menemukan perbandingan indikator tersebut di SKPD Kecamatan di Kabupaten/Kota lain yang letaknya 1 (satu) provinsi dengan Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan perbandingan capaian RPJMD Provinsi dan Nasional.
6. Serapan anggaran tahun 2024 sebesar 99,55% didapatkan dari realisasi anggaran sebesar Rp. 432.248.899,- dengan pagu anggaran sebesar Rp. 434.214.700,- atau sebesar 99,55%.

Adapun program kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran pertama Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Pertama Perjanjian Kinerja Camat 2024

Kode Rek Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sub kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan pada DPA Kecamatan Juai Tahun 2024 berisi penganggaran atas pelaksanaan aktifitas kegiatan fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik berupa penyediaan alat operasional pelayanan publik, peningkatan kapasitas petugas pelayanan publik melalui sosialisasi dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya fasilitas informasi (ID Card petugas pelayanan publik, papan maklumat pelayanan, struktur pelayanan, TV LCD dan lemari partisi), makanan dan minuman gratis bagi pemohon layanan publik, souvenir bagi pemohon layanan publik yang beruntung dan alat bermain anak.

Sedangkan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada DPA Kecamatan Juai Tahun 2024 berisi penganggaran atas pelaksanaan aktifitas kegiatan peringatan hari besar keagamaan sebagai urusan kewilayahan yang dilimpahkan ke Kecamatan Juai seperti pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan dan kabupaten, haul datu kandang haji dan safari ramadhan. Telah menjadi tugas Kecamatan Juai untuk memfasilitasi lembaga/instansi terkait dalam pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan tersebut sebagai bentuk pelayanan fasilitasi publik kepada masyarakat dalam membina rasa nasionalisme, NKRI dan keagamaan di wilayah Kecamatan Juai.

Berdasarkan hasil analisis atas realisasi kinerja dan keuangan atas capaian sasaran pertama perjanjian kinerja Camat Juai maka dapat dilakukan perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pendukung capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Pertama  
Perjanjian Kinerja Camat 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Keuangan			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87,65	87,67	100,02%	434.214.700	432.248.899	99,55%	0,48%

Faktor pendorong keberhasilan capaian sasaran kinerja pertama Camat Juai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Juai semakin terorganisir dan selalu dilaksanakan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan.
- b. Adanya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu inovasi anatulus (dana duka santunan kematian proses mulus) yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat Kecamatan Juai dalam kepengurusan permohonan dana bantuan berupa dana duka santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang berasal dari program bantuan Bupati Balangan.
- c. Terdapat dana penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang berisi belanja barang dan jasa peningkatan kualitas layanan berupa sosialisasi produk layanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Sedangkan kendala/faktor penghambat dari pelaksanaan pencapaian kinerja dan keuangan sasaran pertama Kecamatan Juai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Proses penganggaran yang kurang maksimal

Walaupun target tercapai namun sebenarnya hasilnya masih dapat dimaksimalkan lagi jika anggaran yang disediakan memuat pendanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik. Selain itu, jika harga

satuan pada penyusunan dokumen anggaran sama dengan harga satuan pasar maka kelebihan anggaran dapat diminimalisir/ditiadakan.

- b. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya.
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan seperti sarana prasarana pelayanan bagi masyarakat disabilitas, ibu hamil dan menyusui.
- d. Kurangnya pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja masing-masing ASN.

Berdasarkan kendala/faktor penghambat di atas maka solusi dan upaya perbaikan capaian kinerja sasaran pertama yang dapat dilaksanakan di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan proses perencanaan anggaran baik dari segi penentuan belanja maupun besaran belanja agar sesuai dengan rencana realisasi.
- b. Penempatan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya serta sesuai dengan latar belakang pendidikannya dimana hanya terdapat 2 (dua) orang petugas layanan dari 6 (enam) orang petugas layanan di seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial yang pernah mengikuti pelatihan *service excellent*.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi.
- d. Menganggarkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja SKPD meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat seperti kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan yang ramah ibu dan anak serta kaum disabilitas.
- e. Meningkatkan pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja pegawai pada seksi pelayanan dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan peran aktif pegawai bersangkutan dalam mencapai target dan melaporkan capaian kerjanya masing-masing.

Jika sasaran kinerja utama pertama Camat Juai selaku kepala SKPD di Kecamatan Juai tahun 2024 adalah Meningkatkan Fasilitasi Pelayanan Masyarakat maka sasaran kinerja utama kedua Camat Juai adalah Meningkatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja utama Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif. Berikut data analisis capaian atas sasaran kinerja kedua Camat Juai tahun 2024.

Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Kinerja Kedua Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
					Target	Realisasi	Capaian						
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	-	60	70	70	100%	90	77,78%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	95,14%

Adapun beberapa penjelasan yang dapat disimpulkan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi PKK, RT/RW, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sehingga LKD yang dimaksud dalam indikator kinerja sasaran kedua ini terdiri dari berbagai jenis kelompok tersebut yang tersebar di 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai. Hal ini berarti jumlah LKD pada Kecamatan Juai yang diharapkan dapat dibentuk dan diaktifkan keikutsertaannya pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah 5 (lima) jenis LKD per desa atau sejumlah 105 (seratus lima) LKD namun pencapaian jumlah LKD tersebut dilakukan bertahap setiap tahunnya.
2. Target capaian kinerja sasaran kedua pada Perjanjian Kinerja Camat selaku kepala SKPD di Kecamatan Juai tahun 2022 tidak dapat diidentifikasi dikarenakan indikator tersebut belum ditetapkan sebagai target indikator kinerja Camat Juai pada tahun 2022. Penetapan indikator jumlah LKD yang aktif dilaksanakan sejak tahun 2023.
3. Target jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif pada tahun 2023 adalah 60 (enam puluh) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan telah tercapai 100%. Sedangkan target jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tahun 2024 sebanyak 70 (tujuh puluh) dimana target tersebut juga tercapai 100%.

4. Jika rasio capaian tahun 2024 dibandingkan dengan rasio capaian tahun 2023 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran kinerja kedua Camat Juai dinilai stabil dan kategori **sangat berhasil** dengan rasio capaian sebesar 100%.
5. Serapan anggaran untuk mencapai target sasaran kinerja kedua atas perjanjian kinerja Camat sebesar adalah sebesar Rp. 354.065.310,- dari anggaran sebesar Rp. 372.156.100,- atau sebesar 95,14%.
6. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja akhir tahun renstra sebanyak 90 (sembilan puluh) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) maka besaran capaian sasaran kinerja kedua tahun 2024 sebesar 77,78% yang didapatkan dari 70 LKD dibagi 90 LKD lalu dikalikan 100%.
7. Perbandingan capaian sasaran kinerja kedua tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD sejenis di Kabupaten/Kota lain dikarenakan tidak dapat menemukan perbandingan indikator tersebut di SKPD Kecamatan di Kabupaten/Kota lain yang letaknya 1 (satu) provinsi dengan Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan perbandingan capaian RPJMD Provinsi dan Nasional.

Adapun program kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran kedua Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024 yaitu meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024

Kode Rek Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03	2.01	0003	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
7.01.03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
7.01.03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa berisi penganggaran aktifitas kegiatan koordinasi pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa agar aktif berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sehingga aspirasi/pendapat kelompoknya

terakomodir atau tersampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut. Sedangkan sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan berisi anggaran atas aktifitas kegiatan pendataan, koordinasi penanganan stunting desa, pendampingan rembuk stunting desa serta pelaksanaan rembuk stunting kecamatan. Penanganan stunting di desa dilaksanakan oleh kader stunting desa dan melibatkan beberapa jenis LKD di desa dalam pelaksanaan kegiatannya.

Sub kegiatan pendukung pencapaian sasaran kinerja utama kedua lainnya adalah sub kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang berisi anggaran mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di desa oleh Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM) khususnya kepengurusan atau keaktifan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sub kegiatan terakhir pendukung pencapaian sasaran kinerja utama kepala SKPD yang kedua adalah sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dimana sub kegiatan tersebut memiliki anggaran yang digunakan untuk mengakomodir pelaksanaan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa.

Berdasarkan hasil data capaian kinerja dan keuangan atas sasaran kinerja utama kedua Camat Juai sesuai dokumen perjanjian kinerja Camat Juai tahun 2024 maka dapat dilakukan analisis atas efesiensi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja atas sasaran tersebut sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 7 Analisis Efesiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Keuangan			Efesiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	70 LKD	70 LKD	100%	372.156.100	354.065.310	95,14%	4,86%

Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran kinerja kedua ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang secara langsung mendukung upaya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dimana terdapat 3 (tiga) sub kegiatan di dalamnya yang menyediakan dana untuk pelaksanaan

fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di lingkup pemerintah Kecamatan Juai. Serta 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang khusus mengakomodir pendanaan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga PKK sebagai salah satu LKD yang harus aktif dalam kegiatan pembangunan di desa.

- b. Adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara kecamatan dan desa dalam pendataan dan pembinaan LKD aktif di desa.
- c. LKD yang telah terbentuk memiliki struktur organisasi/kepengurusan yang disahkan oleh Keputusan Kepala Desa sehingga memenuhi persyaratan LKD aktif.
- d. Adanya bantuan dari CSR dunia usaha (PT.Adaro) dalam membantu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Juai khususnya bantuan penanganan stunting desa.

Faktor penghambat/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada dana peningkatan kapasitas anggota LKD yang secara langsung dapat memfasilitasi pembinaan per jenis LKD.
- b. Pembentukan dan pengaktifan LKD memerlukan dana penyelenggaraan berupa sosialisasi pembentukan dan fasilitasi pembinaan ke desa-desa.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya anggota LKD untuk aktif dalam perencanaan pembangunan desa.
- d. SDM di seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Juai belum terpenuhi untuk melakukan pembinaan secara mendalam mengenai penyelenggaraan pembinaan LKD.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan proses perencanaan anggaran baik dari segi penentuan belanja maupun besaran belanja agar sesuai dengan realisasi di lapangan.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi serta memfasilitasi pembinaan ke desa didampingi oleh SKPD terkait yang membidangi mengenai pembinaan masing-masing LKD.
- c. Menganggarkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja SKPD

Tabel 3. 8 Capaian Sasaran Kinerja Ketiga Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
					Target	Realisasi	Capaian						
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	94,02%	

Berdasarkan data tersebut di atas beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani pada tahun 2023 dan 2024 adalah 100% atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Artinya semua gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan ke Kecamatan Juai melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum telah ditangani dengan baik karena formulasi perhitungan yang digunakan dalam menghitung realisasi indikator kinerja utama atas sasaran kinerja ketiga Camat Juai sebagaimana yang tercantum dalam dokumen surat keputusan Camat Juai tentang indikator kinerja utama Kecamatan Juai Periode Tahun 2023-2026 adalah Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani Dibagi Jumlah Kasus yang Terjadi Dikali 100%.
2. Pada tahun 2024 telah terjadi pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 6 (enam) kali yaitu bencana banjir sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali pengaduan warga mengamuk karena gangguan kejiwaan dan 1 (satu) kali pengaduan berupa pengamanan peminta sumbangan keliling tidak berizin. Keenam pengaduan telah tertangani dengan baik dengan berkoordinasi bersama lintas sektor yang tergabung dalam forum komunikasi kepemimpinan kecamatan (forkopimcam) Kecamatan Juai seperti pihak kepolisian, TNI dan puskesmas serta instansi terkait seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, tim CSR PT. Adaro dan lain sebagainya.



3. Capaian tahun 2022 tidak dapat teridentifikasi dikarenakan pada tahun 2022 data tersebut belum menjadi indikator kinerja sasaran SKPD sehingga tidak pernah dilakukan perhitungan capaiannya di tahun 2022. Sedangkan tahun 2023 tidak ada pengaduan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan dan tertangani sehingga capaian kinerja tahun 2023 dinilai tercapai 100%.
4. Dikarenakan capaian akhir tahun renstra adalah 100% maka rasio atas capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target capaian akhir tahun renstra adalah 100%.
5. Perbandingan capaian sasaran kinerja ketiga tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD sejenis di Kabupaten/Kota lain dikarenakan tidak dapat menemukan perbandingan indikator tersebut di SKPD Kecamatan di Kabupaten/Kota lain yang letaknya 1 (satu) provinsi dengan Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan perbandingan capaian RPJMD Provinsi dan Nasional.
6. Serapan anggaran sebesar untuk mencapai target sasaran ketiga atas perjanjian kinerja Camat adalah sebesar Rp. 678.922.434,- dari anggaran sebesar Rp. 722.115.300,- atau sebesar 94,02%.

Adapun program kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ketiga Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024 dengan serapan anggaran sebesar 94,02% sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 9 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Kedua Perjanjian Kinerja Camat 2024

Kode Rek Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.05	2.01	0001	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05	2.01	0004	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal

Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan berisi penganggaran mengenai peningkatan koordinasi antara Kecamatan Juai dengan instansi lintas sektor dalam

forum komunikasi pimpinan kecamatan (forkopimcam), pembinaan tenaga linmas desa serta pelaksanaan aktivitas pengaduan/pelaporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional berisi penganggaran peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban umum, NKRI dan toleransi beragama serta anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan petugas pemadam kebakaran Kecamatan Juai. Sub kegiatan terakhir yang mendukung pencapaian indikator sasaran ketiga Camat Juai adalah sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal yang memuat anggaran mengenai peringatan hari besar nasional atau kabupaten seperti peringatan hari kemerdekaan RI tingkat kecamatan dan peringatan hari jadi Kabupaten Balangan tingkat kecamatan. Hal ini penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan upaya Kecamatan Juai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keanekaragaman NKRI serta penumbuhan rasa nasionalisme warga masyarakat di Kecamatan Juai.

Berdasarkan hasil analisis atas realisasi kinerja dan keuangan atas capaian sasaran ketiga perjanjian kinerja Camat Juai tahun 2024 maka dapat dilakukan perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pendukung capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 10 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Capaian Sasaran Kinerja Ketiga Perjanjian Kinerja Camat Juai 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Keuangan			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%	722.115.300	678.922.434	94,02%	5,98%

Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang menyediakan dana untuk pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam dan desa dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.

2. Hubungan kerjasama antar forkopimcam, Kecamatan Juai dan desa telah terjalin baik sebelumnya sehingga memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi penanganan ataupun pelaporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Juai.
3. Adanya bantuan penanganan kasus hukum berupa penyediaan ruang restorative justice, dimana masyarakat diberi ruang mediasi penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan negeri atau kejaksaan.

Sedangkan faktor penghambat / kendala yang dihadapi saat melakukan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat khususnya generasi muda sehingga menghambat proses pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM petugas Linmas di desa sebagai garda terdepan pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Merancang ulang belanja barang dan jasa tahun 2024 untuk meningkatkan penyediaan dana peningkatan kapasitas petugas linmas serta pelaksanaan sosialisasi pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan koordinasi forkopimcam dan aparat desa agar pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum semakin lancar dan mudah dilaksanakan.

Sasaran kinerja terakhir dari sasaran kinerja utama pada Perjanjian Kinerja Camat Juai selaku pimpinan atau kepala SKPD di Kecamatan Juai adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase desa tertib administrasi pemerintahan

Indikator ini ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama sasaran kinerja keempat Camat Juai dikarenakan Pemerintah Kecamatan Juai perlu mengukur ketaatan pemerintah desa dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan pemerintahan desa yang tertib dalam penyusunan dokumen pemerintahan seperti LPPD dan Laporan Kinerja BPD sehingga formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi capaiannya adalah jumlah LPPD dan Laporan Kinerja B PD yang disampaikan seluruh desa dibagi 2 (dua) laporan per desa dikali 100%.

2. Persentase desa yang tertib administrasi keuangan

Indikator ini ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama sasaran kinerja keempat Camat Juai dikarenakan Pemerintah Kecamatan Juai perlu mengukur

ketaatan pemerintah desa dalam memenuhi ketentuan desa tertib administrasi keuangan dan pendayagunaan aset desa yaitu penyusunan laporan realisasi per bulan per sumber dana sehingga formulasi perhitungan yang dipergunakan untuk mengukur realisasi capaiannya adalah jumlah laporan realisasi keuangan yang disampaikan seluruh desa dibagi jumlah desa dikali 100%

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran Kinerja Keempat Kecamatan Juai Sesuai Perjanjian Kinerja Camat Juai Tahun Anggaran 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Capaian 2023	Kinerja 2024			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir Renstra	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
				Target	Realisasi	Capaian						
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	97,26%
	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	96,70%

Terdapat beberapa point yang harus dijelaskan dalam tabel capaian tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) indikator tercapainya sasaran kinerja keempat Kecamatan Juai berupa meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu persentase desa tertib administrasi pemerintahan dan persentase desa tertib administrasi keuangan. Adapun capaian dari kedua indikator tersebut pada tahun 2023 dan 2024 adalah 100% sehingga rasio capaiannya pun menjadi 100%.
2. Capaian tahun 2022 tidak teridentifikasi dikarenakan indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan tahun 2023 dan 2024 sehingga tidak pernah dilakukan pendataan untuk capaian tersebut di tahun 2022.
3. Dikarenakan capaian akhir tahun renstra adalah 100% maka rasio atas capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target capaian akhir tahun renstra adalah 100%.

4. Perbandingan capaian sasaran kinerja keempat tahun 2024 bagi kedua indikator kinerja utama tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja SKPD sejenis di Kabupaten/Kota lain dikarenakan tidak dapat menemukan perbandingan indikator tersebut di SKPD Kecamatan di Kabupaten/Kota lain yang letaknya 1 (satu) provinsi dengan Kabupaten Balangan. Demikian pula dengan perbandingan capaian RPJMD Provinsi dan Nasional.
5. Anggaran yang tersedia untuk pencapaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dan sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan total anggaran sebesar Rp.233.763.500,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.223.666.600,00. Hal ini berarti capaian serapan anggaran sebesar 97,26%.
6. Anggaran tersedia untuk pencapaian indikator persentase desa tertib administrasi keuangan pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang jika dijumlahkan anggarannya sebesar Rp.209.240.300,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.208.669.800,00 atau sebesar 96,70%.

Daftar program kegiatan atau sub kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran keempat Perjanjian Kinerja Camat Tahun 2024 untuk masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran Keempat Perjanjian Kinerja Camat 2024

Kode Rek Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
7.01.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
<i>Indikator Kinerja Utama : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan</i>			
7.01.06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
<i>Indikator Kinerja Utama : Persentase Desa yang Tertib Administrasi Keuangan</i>			
7.01.06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.01.06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator sasaran kinerja persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sub kegiatan ini berisi anggaran tentang pelaksanaan keikutsertaan dan pembinaan lomba desa tingkat Kabupaten Balangan, pembinaan aparat desa mengenai tertib administrasi pemerintahan umum khususnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) dan Laporan Kinerja Tahunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi salah satu persyaratan untuk pencairan alokasi dana desa.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Sub kegiatan ini berisi anggaran tentang pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa di wilayah Kecamatan Juai. Semua desa di Kecamatan Juai telah ditetapkan titik koordinat batas desanya namun terdapat 2 (dua) titik koordinat desa yang berbatasan dengan kecamatan awayan namun dikarenakan perbatasan desa ini antar kecamatan maka Kecamatan Juai dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam proses penyelesaian sengketanya.

Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulasi perhitungan capaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah Jumlah LPPD dan Laporan Kinerja BPD yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi 2 (Dua) Laporan Per Desa Dikali 100% sedangkan indikator persentase desa tertib administrasi keuangan dicapai dengan formulasi perhitungan Jumlah Laporan Realisasi Keuangan yang Disampaikan Seluruh Desa Dibagi Jumlah Desa Dikali 100%.
2. Adanya keselarasan penganggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kedua indikator tersebut di atas.
3. Adanya sanksi bagi desa yang tidak memenuhi ketentuan tertib administrasi keuangan maupun administrasi pemerintahan tepat waktu yaitu terhambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kedua indikator kinerja utama pada sasaran kinerja utama keempat Camat Juai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib administrasi umum dan keuangan.

2. Kurangnya kesadaran pemerintah desa dalam menyampaikan dokumen kelengkapan desa tertib administrasi pemerintahan dan keuangan serta meningkatkan kerjasama dan toleransi antar unsur pemerintah desa dalam mewujudkan desa tertib administrasi tersebut.

Berdasarkan kendala tersebut di atas maka solusi yang diupayakan oleh Kecamatan Juai dalam rangka mencapai target kedua indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM di Kecamatan Juai untuk membina, mengawasi dan mengevaluasi dokumen administrasi pemerintahan umum dan dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan umum dan pengelolaan keuangan di desa oleh aparat di Kecamatan Juai.
3. Pemerintah Kecamatan Juai perlu meningkatkan fasilitasi atas penyelenggaraan dan penyampaian program kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah terkait.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berjumlah Rp. 7.996.663.078,00 yang meliputi belanja operasi berjumlah Rp. 7.022.668.878,00 dan belanja modal berjumlah Rp. 973.994.200,00. Anggaran belanja operasi terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 3.269.845.678,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp. 3.752.823.200,00. Sedangkan anggaran yang berhasil direalisasikan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 7.490.354.404,00 atau sekitar 93,67% dan terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 6.580.929.405,00 atau 93,71% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.939.443.064,00 atau sekitar 89,90% dan belanja barang sebesar Rp. 3.641.486.341,00 atau sekitar 97,03 % serta belanja modal sebesar Rp. 909.424.999,00 atau sekitar 93,37%. Belanja modal tahun 2024 terbagi menjadi 2 (dua) jenis belanja modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 902.274.999,00 atau 93,32% dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 7.150.000,00 atau 99,79%.

Berikut adalah data perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 pada Kecamatan Juai terhitung per 31 Desember 2024 :

Tabel 3. 13 Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/KabupatenKota	6.025.173.178	5.592.781.361	92,82
1.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	306.851.700	304.556.268	99,25
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.515.500	6.515.500	100
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	6.469.500	5.661.700	87,51
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	293.866.700	292.379.068	99,49
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.376.670.578	3.045.667.964	90,20
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.269.845.678	2.939.443.064	89,90
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.824.900	106.224.900	99,44
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.040.000	18.900.493	99,27
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	19.040.000	18.900.493	99,27
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.990.200	732.933.817	99,58
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.461.500	9.461.500	100
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.844.300	138.320.600	99,62
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	587.684.400	585.151.717	99,57
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	635.248.700	579.810.551	91,27
1.5.1	Penyediaan Surat Menyurat	139.267.100	137.887.300	99,01
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.094.200	121.615.251	81,57
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	346.887.400	320.308.000	92,34



1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	951.372.000	910.912.268	95,75
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	715.039.000	675.184.750	94,43
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	236.333.000	235.727.518	99,74
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	434.214.700	432.248.899	99,55
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	219.579.800	219.183.899	99,82
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	219.579.800	219.183.899	99,82
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	214.634.900	213.065.000	99,27
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	214.634.900	213.065.000	99,27
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	372.156.100	354.065.310	95,14
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	231.486.900	231.271.300	99,91
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49.507.400	49.507.400	100,00
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	79.870.000	79.686.100	99,77
3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	102.109.500	102.077.800	99,97
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	140.669.200	122.794.010	87,29
3.2.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	140.669.200	122.794.010	87,29

	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	295.471.700	260.547.500	88,18
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	295.471.700	260.547.500	88,18
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	295.471.700	260.547.500	88,18
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	426.643.600	418.374.934	98,06
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	426.643.600	418.374.934	98,06
5.1.1	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	121.116.000	115.149.900	95,07
5.1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	305.527.600	303.225.034	99,25
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	443.003.800	432.336.400	97,59
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	443.003.800	432.336.400	97,59
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	137.971.300	130.775.400	94,78
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	137.773.300	137.276.600	99,64
6.1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.449.200	30.384.200	99,79
6.1.4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	41.017.800	41.009.000	99,98

6.1.5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	95.792.200	92.891.200	96,97
Total Anggaran / Realisasi / Rata-Rata Rasio Capaian		7.996.663.078	7.490.354.404	93,67

### 3.3 ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya adalah upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai hasil maksimal dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan sumber daya anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebagaimana tampak pada rumus di bawah ini.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

RAK ke i = realisasi anggaran

RVK ke i = realisasi kinerja

PAK ke i = target anggaran

RVK ke i = target kinerja

Jika rumus tersebut di atas dimasukkan ke dalam perhitungan realisasi kinerja dan anggaran per sasaran kinerja utama pada Perjanjian Kinerja Camat Juai tahun 2024 maka data efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas capaian targer sasaran kinerja utama Camat Juai tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Daftar Analisis Efisiensi Sumber Daya Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Juai Tahun 2024

Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Kinerja 2024			Keuangan 2024			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial	87,65	87,67	100,02%	434.214.700	432.248.899	99,55%	0,48%
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	70 LKD	70 LKD	100%	372.156.100	354.065.310	95,14%	4,86%
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%	722.115.300	678.922.434	94,02%	5,98%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan	100%	100%	100%	233.763.500	223.666.600	97,26%	2,74%
	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	209.240.300	208.669.800	96,70%	3,30%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan beberapa hal penting yaitu :

1. Tingkat efisiensi yang paling tinggi adalah efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian sasaran kinerja utama pertama Camat Juai tahun 2024 yaitu meningkatnya fasilitas pelayanan masyarakat sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah efisiensi sumber daya atas pencapaian kinerja sasaran kinerja utama ketiga Camat Juai yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

2. Sasaran kinerja utama pertama Camat Juai memiliki tingkat efisiensi tertinggi dikarenakan pencapaian kinerja yang melebihi 100% dan realisasi anggarannya yang tinggi pula sebesar 99,55%.
3. Sasaran kinerja utama ketiga Camat Juai memiliki tingkat efisiensi sumber daya yang rendah dikarenakan realisasi keuangannya yang paling rendah sebesar 94,02% sedangkan capaian kinerja tercapai sesuai target yaitu 100%.

### 3.4 ANALISIS KINERJA LAINNYA

Terdapat beberapa penghargaan yang diraih oleh Kecamatan Juai pada tahun 2024 sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15 Daftar Penghargaan yang Diterima Kecamatan Juai Tahun 2024

No.	Tanggal	Tempat	Penghargaan	Keterangan
1.	30 Mei 2024	Kab Balangan	Lomba Desa (Desa Hukai)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan
2.	30 Oktober 2024	Halaman Kantor Bupati Balangan	Juara 3 Lomba PBB Satlinmas Tingkat Kabupaten	Satpol PP Kabupaten Balangan
3.	5 Desember 2024	Ar Raudah Resto Paringin	Pengawasan kearsipan internal SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Balangan
4.	22 Desember 2024	Mayang Maurai	Juara III Lomba UP2K PKK Tingkat Kabupaten Balangan	Ketua TP PKK Kabupaten Balangan
5.	22 Desember 2024	Mayang Maurai	Juara III Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Balangan	Ketua TP PKK Kabupaten Balangan
6.	22 Desember 2024	Mayang Maurai	Juara II Lomba Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Balangan	Ketua TP PKK Kabupaten Balangan
7.	22 Desember 2024	Mayang Maurai	Juara 4 Lomba Administrasi PKK Tingkat	Ketua TP PKK Kabupaten Balangan

			Kabupaten Balangan	
--	--	--	--------------------	--

Sedangkan inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Juai dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Batas Desa Berbasis Partisipatif (PETA BAPER)

Inovasi yang dilakukan oleh seksi penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat proses pemetaan batas desa di wilayah Kecamatan Juai.

2. Sistem Publikasi Digital (Silikit)

Inovasi yang dilakukan untuk mengaktifkan media informasi digital di Kecamatan Juai.

3. Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus (Ana Tulus)

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan klaim bantuan uang kematian bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang dicanangkan sebagai program kerja Bupati Balangan terpilih saat ini.

4. Sinergi Linmas dengan Masyarakat (Sinar Linmas)

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan Satlinmas di desa.

5. Evaluasi Cepat Berkolaborasi dengan Pemerintahan Desa (Si Cabe Pedas)

Inovasi yang dilaksanakan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan evaluasi administrasi desa di seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa khususnya dalam rangka pencapaian target indikator kinerja desa tertib administrasi keuangan desa.

6. Sistem Disposisi Digital (Sidigit)

Inovasi berupa sistem untuk meningkatkan tata kelola pemerintah Kecamatan Juai dengan cara mempermudah proses disposisi surat masuk sehingga memudahkan proses dan meningkatkan keterbukaan komunikasi antar pegawai di Kecamatan Juai.

7. Pengukuran Kinerja dan Keuangan (Kurkinku)

Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Juai khususnya dalam penyusunan dan penyampaian laporan pengukuran capaian kinerja dan keuangan masing-masing aparatur sipil Negara sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditentukan.

8. Sistem Informasi Desa (Sispemdes)

Inovasi yang dilakukan untuk menyajikan suatu sistem yang dapat menyediakan keseluruhan data profil desa.

Berdasarkan hasil rekomendasi yang tercantum dalam dokumen laporan hasil evaluasi LKIP tahun 2023 Nomor : 700/147/LHE/Inspektorat-Blg/2024 tanggal 19 Juli 2024 maka rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan Juai di tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
<b>Perencanaan Kinerja</b>		
1.	Menyempurnakan Diagram Crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja	Sesegeranya menyusun draft diagram crosscutting kecamatan
<b>Pengukuran Kinerja</b>		
2.	Agar kedepannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat memberikan informasi efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan	Akan disusun tabel efisiensi anggaran yang memuat target kinerja, realisasi kinerja, rencana anggaran dan realisasi anggaran
<b>Pelaporan Kinerja</b>		
3.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginfokan perbandingan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Sebagian telah ditindaklanjuti penyediaan informasi berupa perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
4.	Agar kedepannya Laporan Kinerja (LKjIP) memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.	Akan mengusahakan untuk menemukan laporan realisasi kinerja Kecamatan Lain di Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi yang sama
5.	Pada penutup LKjIP terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja	Telah ditindaklanjuti pencantuman solusi atas kendala pencapaian

	tahun berikutnya berdasarkan hambatan atas kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan.	kinerja sasaran tahun 2023
<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</b>		
6.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya.	Telah disusun tabel matrik tindak lanjut atas LHE tahun sebelumnya (2022) dan sebagian telah selesai ditindaklanjuti



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD**

Telah dilaksanakan program kegiatan Kecamatan Juai tahun 2024 dengan capaian atas indikator tujuan berdasarkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diasumsikan **sangat berhasil** karena capaiannya sebesar 87,67 dengan target sebesar 87,65 atau rasio capaian kinerja sebesar 100,02%.

#### **4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam pelaksanaan tugas fungsi kecamatan juai, seluruh stakeholder di Kecamatan Juai berkomitmen untuk mencapai target perjanjian kinerja masing-masing per 31 Desember 2024 Adapun rincian dari capaian perjanjian kinerja kepala SKPD (camat) pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Daftar Rincian Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	87,65	87,67	100,02 %
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	70	70	100%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
			Persentase desa tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%

#### 4.3. UPAYA PERBAIKAN

Berapa langkah yang dapat ditempuh kecamatan juai untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mempertahan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian “sangat berhasil”.
2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.
4. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dengan cara melakukan inovasi terhadap jenis-jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Juai yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan pelayanan;
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitasi SDM pegawai di Lingkungan Kecamatan Juai.
6. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan.
8. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus terhadap perencanaan dan pelaksanaan semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Juai ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian target tahun 2024. Walaupun penyusunan laporan ini masih jauh dari nilai sempurna namun kami harap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keberhasilan kinerja Kecamatan Juai Tahun 2024 dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Juai, Februari 2025

**CAMAT JUAI,**



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**